

## BAB VI

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru dan beberapa SKPD yang ada di Kota Pekanbaru berhubungan dengan Analisis Monitoring dan Evaluasi (MONEV) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa :

1. Bappeda Kota Pekanbaru sangat sulit memperoleh data dari SKPD karena banyaknya SKPD yang ada di Kota Pekanbaru. Saat ini SKPD yang ada di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 44 SKPD. Sehingga Bappeda harus menunggu satu persatu laporan dari SKPD dan menlai seluruh secara bersamaan.
2. SKPD Kota Pekanbaru dalam melakukan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan kepada Bappeda berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia nomor 39 tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 dan 2 belum maksimal. Karena, masih banyak SKPD yang belum melaporkan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
3. Kurangnya tenaga ahli yang dimiliki SKPD juga menjadi faktor penghambat dalam peroses monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda. Akibatnya, rendahnya kualitas data dan informasi dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan SKPD kepada Bappeda dan masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pelaporan yang membuat Bappeda mengembalikan kembali hasil laporan kinerja kepada SKPD pelapor.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi faktor penghambat dalam Monitoring Evaluasi (MONEV) yang dilakukan Bappeda Kota Pekanbaru adalah

1. Sulitnya Bappeda dalam mengumpulkan data dari SKPD yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Rendahnya kualitas data dan informasi.
3. Masih banyak SKPD yang terlambat dalam melaporkan hasil kinerja kepada Bappeda.

Dari hambatan yang di temukan dalam proses monitoring evaluasi ada beberapa faktor penyebab terjadinya hambatan dalam proses Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bappeda.

1. Masalah internal di SKPD
2. Kurangnya tenaga ahli yang dimiliki SKPD
3. Kurangnya penegasan sanksi yang diberikan Bappeda kepada SKPD yang sering terlambat dan salah dalam melaporkan hasil kinerjanya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis mempunyai beberapa saran untuk Bappeda Kota Pekanbaru dan SKPD yang ada di Kota Pekanbaru dalam menjalankan Proses Monitoring dan Evaluasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Bappeda Kota Pekanbaru**
  - a. Untuk meningkatkan kedisiplinan SKPD dalam melaporkan hasil kinerjanya, Perlu adanya penegasan hukum dan sanksi yang tegas untuk SKPD yang sering terlambat dalam melaporkan hasil kinerja setiap triwulan kepada Bappeda supaya tidak ada lagi SKPD yang suka terlambat dalam melaporkan hasil kinerjanya kepada Bappeda Kota Pekanbaru.
  - b. Dalam upaya mengurangi kesalahan dalam format pelaporan hasil kinerja SKPD yang ada di Kota pekanbaru, Bappeda harus membimbing lebih SKPD dalam bentuk mengadakan pelatihan, sosialisasi, bimbingan yang lebih dan merata kepada setiap SKPD yang ada di Kota Pekanbaru supaya kesalahan dalam pelaporan hasil kinerja dapat diminimalkan.
  - c. Perlu adanya penambahan personel kerja dalam monitoring evaluasi atau membaharuan struktur kerja yang mungkin akan melibatkan teknologi sebagai media dalam proses Monitoring Evaluasi.
2. **SKPD Kota Pekanbaru**
  - a. Untuk meningkatkan pemahaman pelaporan hasil kinerja yang dilakukan setiap triwulannya kepada Bappeda, seharusnya SKPD tidak hanya menunggu pelatihan atau tindakan dalam meningkatkan pemahaman yang dilakukan Bappeda saja. Seharusnya SKPD mengikutkan salah satu dari pegawai untuk



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti pelatihan diluar dari yang di adakan Bappeda Kota Pekanbaru.

- b. Dalam bentuk mengurangi kesalahan dalam pelaporan hasil kinerja yang dilakukan setiap triwulannya kepada Bappeda, SKPD seharusnya mempunyai tenaga ahli yang khusus bertanggung jawab mengetahui secara jelas tentang bagaimana proses pelaporan hasil kinerja yang akan dilakukan kepada Bappeda setiap triwulannya.
- c. Kedisiplinan waktu pelaporan hasil kinerja seharusnya juga menjadi perhatian lebih yang harus diperhatikah oleh SKPD. keterlambatan pelaporan juga menyulitkan Bappeda dalam menyusun dan merekap semua laporan hasil kinerja SKPD yang ada di Kota Pekanbaru.